

VISI DAN PONDASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Tinjauan Terhadap Visi dan Pondasi Pendidikan Tinggi Unisba

Sanusi Uwes*

Abstrak

Dalam suatu organisasi yang besar, termasuk lembaga pendidikan tinggi, seringkali dituntut untuk memiliki visi : “mau dibawa ke mana organisasi institusi tersebut diarahkan”?. Karena, visi merupakan daya pandang jauh ke depan yang -- sekalipun bersifat abstrak --, tetapi visi dapat berfungsi sebagai titik tolak seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi institusi untuk membuat kebijakan dan pelaksanaan programnya. Pondasi pendidikan adalah dasar atau asas yang dijadikan rujukan pokok dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan program-program pendidikan sesuai dengan visinya.

Unisba sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai ruh (jiwa) dalam proses formulasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan program-program pembelajarannya. Karena, ketiadaan visi dalam suatu lembaga pendidikan tinggi, potensial dapat mengakibatkan adanya disfungsi dan misevaluasi dalam membuat kebijakan dan strategi pelaksanaannya.

Kata kunci : Visi, Misi

* Sanusi Uwes, Dr., MPd. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah, Pembantu Rektor Bidang Pendidikan Universitas Islam Bandung.

1 Pendahuluan

Membicarakan pendidikan tinggi Islam, terutama di Unisba, paling tidak melibatkan pembicaraan mengenai pendidikan, keislaman serta ke-Unisba-an. Ketiga aspek tersebut tentu berkaitan dengan aspek-aspek lain diluarnya, saling tali temali dan malah saling berpengaruh, baik kekuatan maupun kelemahannya. Saling berkaitan terletak baik pada unsur-unsur pendidikan dalam Islam, unsur-unsur pendidikan dalam masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia, dan unsur-unsur keislaman di Unisba. Selain berkaitan antar unsur, terdapat faktor lain yang menentukan luas dan dalamnya materi pembicaraan. Faktor tersebut adalah visi, baik visi subjek pembicara ataupun subjek pembahas dan pemerhati lainnya. Visi adalah daya pandang jauh ke depan yang bersifat abstrak dan berfungsi sebagai titik tolak seseorang membuat program atau kebijakan. Dalam suatu organisasi, posisi visi pimpinan sangat menentukan. Tidak sedikit perusahaan besar yang dengan susah payah dibangun para pendahulunya kemudian ambruk berantakan karena para pemimpin pelanjut tidak memiliki visi yang bulat dan luas. Ketiadaan visi demikian akan mengakibatkan disfungsi dan misevaluasi dalam membuat kebijakan dan strategi organisasi. Akibatnya masalah besar dan strategis tidak mendapat respond yang semestinya, karena energinya terkuras dalam menghadapi persoalan kecil dan tetek bengek.

Dalam kaitan inilah pembicaraan tentang proses pendidikan tinggi Islam Unisba, khususnya penulis berharap kita semua dapat mengembangkan pikiran segar yang akan memperluas visi kita semua, terutama yang berkenaan dengan peningkatan mutu proses pendidikan, dan pembelajaran di Universitas Islam Bandung.

2 Pendidikan Islam

Pendidikan dalam dalam khazanah keislaman, baik dalam konsep tarbiyah (An Nahlawi, 1989) ta'lim (Abdul Fatah Jalal, 1988) maupun ta'dib (Naquib Al Attas, 1987) adalah kegiatan khas manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat dan harus dididik. Sebagai makhluk yang dapat dididik manusia menerima warisan dan melanjutkan kekayaan budaya generasi sebelumnya. Sementara sebagai makhluk yang harus dididik, manusia

dikembangkan atau diubah kondisinya dari keadaan terakhirnya. Dua aspek fitrah manusia ini sangat penting, sebab dari keduanya manusia dapat hidup efisien dan maju. Efisien karena melalui pewarisan budaya dari generasi sebelumnya, manusia tidak harus memulai segalanya dari awal. Maju, sebab dalam perubahan manusia selalu menginginkan hal yang lebih baik. Paling tidak, mempertahankan keberhasilan dan membuang kegagalan.

Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah warisan keberhasilan biasanya memperlihatkan kemantapan (stable), kemudian melahirkan kemapanan (settled), dan berujung pada kenyamanan (comfortable). Nah, disini muncul persoalan, yakni kenyamanan biasanya susah untuk digoyahkan oleh perubahan. Padahal perubahan juga merupakan fitrah kehidupan manusia. Di dunia ini tidak ada yang tetap menetap kecuali kata “perubahan” itu sendiri, perubahan dapat terjadi ke arah yang baik (QS 93:4) atau ke arah buruk (QS 28: 88). Mendidikan kesadaran akan perubahan inilah sisi penting lain dari tugas pendidikan. Pendidikan selain mengawetkan warisan budaya masa lalu, juga berfungsi mengembangkan budaya tersebut. Modal utama fungsi kedua ini adalah sikap mental yang bagaimana? Diantara jawaban yang paling niscaya bagi UNISBA ialah scientific and Islamic attitude”.

Sebagai kegiatan yang berfungsi ganda, yakni pengawetan dan pengembangan budaya, pendidikan Islam pertama-tama harus dilandasi oleh falsafah, didukung oleh teori dan ditindak lanjuti oleh praktek-praktek yang Islami. Keislaman suatu budaya ditandai oleh dua hal. Pertama otentisitas ajaran dan kedua transformasi ajaran sesuai ruang dan waktu tempat Islam dipraktekkan. Otentisitas ajaran Islam ditandai oleh sifat-sifatnya yang holistik (menyeluruh) dan integral (menyatu), sementara transformasinya ditandai oleh sifat-sifatnya yang hikmah (kebaikan dalam berbagai dimensinya) dan ma'ruf (kebaikan sesuai situasi dan kondisi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip). Baik dalam dataran otentiknnya maupun transformatifnya, **Islam harus memberi ruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan, dari formulasi tujuan sampai praktek evaluasi, piranti keras dan piranti lunak sampai bimbingan penempatan dan malah penarikan (withdrawl).**

Mempertentangkan antara otentisitas (teks asli ajaran) dan transformatif (penerapan jiwa keislaman pada seluruh aspek kehidupan) selain kurang bijaksana, juga tidak relevan bagi ummat Islam. Kita harus

segera menghentikan pembicaraan yang mempertentangkannya. Sebab selain tidak dan malah kontra produktif, juga akan membiarkan peluang-peluang beramal shaleh direbut oleh pihak-pihak lain yang tidak ramah terhadap Islam. Seyogianya kita berpikir lebih proaktif, positive thinking, yakni menyumbangkan kreasi-kreasi baru bagi munculnya berbagai kebaikan dalam kehidupan keummatan ini.

3 Ummat Islam dan Pendidikan

Bagaimana posisi pendidikan mayoritas bangsa ini? Rentang panjang sejarah menunjukkan bahwa ummat Islam ada dalam posisi sasaran kebijakan yang kurang ramah, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan dan pendidikan. Kebijakan kurang ramah pada jaman penjajahan, berpengaruh sangat kuat terhadap kebijakan pemerintahan awal kemerdekaan atau malah masa-masa awal Orba. Kebijakan yang tidak ramah tersebut bentuknya menjauhkan terdidik dari akar budaya mereka yang Islam. Islam dianggap para penjajah Kristen sebagai musuh yang harus dibasmi, atau “benda yang dapat digunakan dan sebab itu dilakukan bagi kemenangan agama Kristen” demikian Cantwell W Smith yang dikutip Victor Tanja.

Pada jaman penjajahan Belanda, terdapat tiga macam jalur pendidikan. **Pertama jalur pendidikan kaum priyayi.** Peserta didik jalur ini diperuntukkan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Karena dibentuk dalam kultur para penjajah, output jalur ini sangat adaptif terhadap budaya dan malah agama para penjajah. Dari jalur ini, muncullah orang-orang Indonesia terdidik berkultur Belanda, yang notabene jauh dari warna keislaman. Dapat dipahami mengapa para birokrat bangsa pribumi dalam pemerintahan jajahan Belanda, sangat anti dan curiga terhadap ummat dan agama Islam.

Jalur kedua, pendidikan Bumi Putera (Vervolg dan MULO Bumi Putera). Peserta didiknya disiapkan bagi jabatan-jabatan rendah Pemerintah Jajahan. Dari segi kurikulum ada kesamaan, yakni tidak memasukkan pendidikan agama Islam. Mereka diberi mata pelajaran budi pekerti dan etika hidup Bangsa Belanda. Dari jalur inipun sama, yakni muncullah orang-

orang Indonesia terdidik tingkat rendah dan menengah yang jauh dari cara berpikir dan malah sinis terhadap Islam.

Kekecualian dimanapun tentu ada. Demikian juga dari kedua jalur tersebut. Terdapat para lulusan yang jiwa keagamaan dan kebangsaannya terpelihara dengan baik. Namun suasana kejiwaan demikian, bukanlah muncul “by design” melalui pendidikan formal yang mereka tempuh atau mereka dapatkan. Suasana kejiwaan demikian lebih disebabkan oleh pendidikan informal, baik di rumah maupun di masyarakat.

Jalur ketiga adalah pendidikan madrasah dan pesantren. Jalur ini adalah tempat pendidikan kebanyakan ummat Islam. Outputnya tidak banyak menguasai ilmu-ilmu empirik. Mereka lebih banyak menguasai ilmu-ilmu normatif keislaman. Lulusannya disiapkan untuk jadi manusia yang ahli agama atau bersifat agamis. Dalam jalur ini siswa tidak dibekali keterampilan untuk berwiraswasta. Namun demikian lapangan hidupnya justru wiraswasta, kebanyakan dalam skala sangat kecil, lokal, baik di bidang perdagangan, pertanian atau peternakan.

Produk kebijakan pendidikan pemerintah jajahan demikian, adalah lahirnya birokrat atau priyayi yang jauh dari agama serta “kaum” agamawan yang memenuhi lapangan pekerjaan “non skill”. Keadaan ini sebagaimana disinggung di muka, terus berlanjut sampai masa kelahiran Orba. Perlu ditambahkan catatan bahwa para priyayi produk pendidikan Belanda tersebut pada masa perjuangan kemerdekaan, pada umumnya mereka bersifat kooptif dengan pemerintah jajahan sampaipun pada masa Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari usaha perebutan kembali oleh Penjajah. Namun uniknya saat kemerdekaan telah utuhpun, mereka itu tetap menduduki jabatan pemerintahan. Alasannya mereka punya keahlian. Sebaliknya para santri pesantren yang berjuang dengan dorongan Lillah, sama sekali non kooperatif terhadap pemerintahan jajahan, berjuang dengan “blangko kosong” tanpa interest apa-apa untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, malahan melalui kebijakan RERA (Restrukturisasi dan Rasionalisasi) mereka tersingkir dari arena pengisian kemerdekaan, saat lembaga-lembaga perjuangannya di formal-kan oleh pemerintah republik. Alasannya sebab mereka buta huruf latin. Dari sinipun kita dapat memahami mengapa saat diperintah oleh bangsa sendiripun, banyak produk kebijakan politik yang tetap kurang ramah terhadap ummat Islam. Sebab posisi-posisi

kunci pembuat berjiwa pendidikan penjajah, yang walaupun tidak anti, minimal mereka bersikap netral terhadap agama.

Derita ini terus berkepanjangan sampai kemudian sedikit demi sedikit secara sinergi berbarengan dengan “para sarjana” yang orang tuanya petani dan pedagang pribumi (hal ini berarti cenderung memiliki keislaman yang kental) menyelinap masuk ke jajaran birokrasi. Sesungguhnya baru sekitar akhir tahun 80-an, umat Islam mendapat sedikit keramahan produk kebijakan pemerintahan. Itupun dengan perjuangan yang luar biasa. Namun hasilnya belum sampai ke tingkat “biasa”. Indikator “belum sampai ke biasa” tersebut, banyak ditemukan, antara lain terpakunya pelaksanaan keislaman para birokrat dalam dataran simbol.

Bila kita mencoba merenungkan kembali perjalanan sejarah pendidikan umat Islam dan implikasinya terhadap kehidupan bernegara, maka dapat dikemukakan beberapa deskripsi penyebab kerugian yang menimpa umat Islam, sebagai berikut :

Pertama, keberpihakan manajemen pemerintahan kepada budaya Barat, yang walaupun tidak serta merta salah, namun sudah dihindangi sikap kurang simpati pada Islam.

Kedua, kebijakan politik pendidikan yang kurang menguntungkan umat Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebencian penjajah Belanda terhadap umat Islam Indonesia.

Ketiga, adanya pembelahan pendidikan normatif keislaman dengan pendidikan dan pengajaran empirik kealaman.

4 Pendidikan Tinggi Unisba: Salah Satu Pilihan

Pada awal berdirinya, Unisba masih diwarnai oleh berpikir jalur model penjajahan Belanda. Disiplin ilmu yang dikembangkan adalah ilmu-ilmu normatif saja, yakni fakultas syari’ah, kemudian Ushuluddin dan kemudian Tarbiyah (sesuatu yang sangat berbeda jauh dengan cara berpikir para pendiri UII di Yogyakarta). Baru pada awal tahun `70-an, itupun dengan penuh tantangan, di bawah kepemimpinan KHEZ Muttaqien, Unisba mengembangkan disiplin ilmu empirik, yakni Hukum, Psikologi dan Teknik.

Masih di bawah kepemimpinan beliau, kemudian dikembangkan pula fakultas MIPA/Statistik, Ekonomi dan Komunikasi.

Keberanian berkreasi KHEZ Muttaqien menunjukkan pemikiran beliau mengenai jenis-jenis ilmu keislaman yang tidak terbatas pada ilmu-ilmu normatif berdasar pada teks Al-Qur'an dan hadits saja. Beliau berpendapat bahwa ilmu-ilmu empirik termasuk ilmu-ilmu keislaman. Hal ini dapat dipahami sebab dalam Al-Qur'an, alam raya inipun termasuk ayat-ayat Allah yang terinderai dan empirik. Ungkapan mengenai "Ilmu-ilmu normatif harus jadi raga bagi ilmu-ilmu empirik" biasa beliau lontarkan pada para mahasiswa ketiga fakultas Dirasah Islamiyah. Karena itu sebaiknya sekarang difahami berbagai istilah keagamaan yang berkenaan dengan dunia keilmuan, perlu ditransformasikan kepada suasana keilmuan masa kini, antara lain istilah yang menjadi tujuan Unisba bagi para mahasiswanya yakni mendidik mahasiswa jadi mujahid, mujtahid dan mujaddid.

4.1 Sikap Mujahid

Mujahid adalah orang yang berjihad. Hampir dapat dipastikan, kalangan luar Islam selalu menterjemahkan jihad dengan arti perang secara phisik. Tentu saja pengertian tersebut salah. Secara etimologis, konstruk kata j-h-d, serta kata-kata jadian yang diturunkan darinya berarti sungguh-sungguh, bekerja keras atau berjuang untuk mencapai sesuatu. Janji yang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh, dalam Al-Qur'an disebut jahda aiymaan (QS S35:42; 5:53). Al-Qur'an sendiri mengartikan jihad dalam periode Mekah dengan melawan diri sendiri sebagaimana terungkap dalam surat 29 ayat 6, yang artinya adalah :

"Dan siapa yang berjihad, maka ia berjihad melawan dirinya sendiri sesungguhnya Allah sungguh Maha Kaya atas seluruh alam".(QS. 29:6)

Ayat ini selain menyatakan bahwa jihad itu bukan berarti perang, juga bermakna bahwa jihad itu ditujukan pada perjuangan bathin. Abdullah Yusuf Ali dalam kaitan ini menyatakan bahwa segala usaha kita pada dasarnya untuk keuntungan diri kita sendiri. Maknanya bahwa segala pengabdian kita pada Allah, sama sekali tidak berarti kita memberikan keuntungan pada Allah. Sebab Allah tidak memerlukan apa-apa dari kita manusia. Sebaliknya dalam keadaan kaya, kita manusia sangat memerlukan Allah. Sementara itu

bila kitapun berbuat jahat, maka itu berarti melakukan sesuatu yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Ayat Makiyah lain yang menunjukkan pengertian jihad bukan perang, sebab memang diturunkan sebelum perintah berperang adalah ayat yang tertera pada surat ke 29 ayat 69 yang artinya adalah :

“Dan orang-orang berjihad (untuk mencari keridlaan) kami, sungguh akan tunjukkan jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik”.(QS. 29:69)

Dalam pada itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah tidak serta merta istilah jihad diartikan sebagai perang. Kebanyakan berarti umum, yakni “mengerahkan segala daya upaya”. Tidak dipungkiri masuk ke dalamnya pengertian perang. Karena itu jumhur Ulama menyatakan bahwa pelaksanaan jihad itu ada empat macam, yakni melalui hati, lidah, tangan, dan perang (Azyumardi’Azra, 1991:76). Yang paling utama sebagai modal da’wah justru jihad dalam bentuk yang pertama, yaitu melalui hati. Hal ini sempat dinyatakan Rasul sebagai jihad akbar yakni perjuangan seseorang dalam dirinya sendiri melawan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Sementara itu jihad dengan lidah dan tangan digunakan dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar. Khusus untuk tugas ini, manakala digunakan oleh hati saja, maka ia merupakan indikator dari kelemahan iman seseorang. Jihad dalam arti perang dengan senjata, adalah jihad dalam rangka membebaskan manusia dari penindasan yang menghilangkan martabat kemanusiaan, termasuk ke dalamnya mempertahankan diri dari serangan atau hinaan martabat manusia kafir terhadap Islam dan ummatnya.

Dilihat dari segi tujuannya, ayat-ayat tentang jihad memiliki tujuan yang beragam. Terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa jihad bertujuan untuk memperlihatkan pada dunia tentang jalan Allah yang benar dan diridloinya, yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (QS S21:107), Islam untuk seluruh ummat manusia yang disampaikan melalui kabar gembira atau bentuk-bentuk peringatan (QS S34:28). Dalam kaitan ini, jihad sama dengan da’wah baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sementara itu, Ibn. Taimiyah menyatakan bahwa jihad merupakan bagian tidak terpisahkan dari amar ma’ruf nahi munkar. Karena itu menurut beliau amar ma’ruf nahi munkar bukanlah suatu kewajiban perorangan, tapi

kewajiban kolektif. Namun demikian manakala seseorang mempunyai kemampuan berkontribusi untuk melakukan jihad, lantas tidak melakukannya, maka dosanya bersifat perorangan. Perlu dicermati bahwa liputan amar ma'ruf nahi munkar dalam konsep Ibn. Taimiyah mencakup bukan saja persoalan ibadat mahdhah seperti shalat, puasa, mengimani Allah sampai pada taqdir. Namun juga termasuk ke dalamnya mengorganisasi manusia dalam persatuan dan kesatuan serta menghindari perpecahan (Ibn. Taimiyah, 1983:53-54). Adalah tidak heran, manakala Azjumaardi Azra (1991:79) menyatakan bahwa bagi Ibn. Taimiyah, jihad lebih ditekankan kepada kegiatan politik. Bagi beliau, kekuatan politik merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi kehidupan sosial. Amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa ditegakkan melalui kegiatan politik. Jihad dalam pengertian perjuangan politik ini, mendapat dukungan bukan saja dari kalangan ahli fikih, tapi juga para filosof muslim. Alfarabi dengan teori al madinah al fudhulah, yaitu unit politik terkecil tempat manusia mencapai kebahagiaan, syarat utamanya bagi para pemimpin unit itu adalah dua, yakni pertama ijtihad dan kedua jihad. Kombinasi kedua faktor ini akan menentukan corak negara dan penguasanya (Azjumaardi Azra, ibid). Senada dengan Al Farabi adalah Ibn. Sina (980-1037), Ibn. Rusyd (1126-1198) dan Hassan al Banna (wafat 1966). Yang terakhir malah menolak pengertian jihad sebagai perang defensif. Beliau menekankan arti lainnya yakni jihad sebagai gerakan politik revolusioner.

Di kalangan kaum muslimin sudah dikenal sejak masa khalifah Abu Bakar, yang mengartikan jihad bukan hanya perang melawan kafir tapi juga melawan sesama muslim yang tidak melaksanakan sunnah nabi, yakni sunnah profetis, bentuknya saat itu adalah perang riddah. Sementara penentangan pada sunnah hasanah, yakni kebiasaan baik yang tercipta dalam proses sosial pada masyarakat Islam, tidak perlu diperangi. Menyusul kemudian pada jaman khalifah Ustman bin Affan apa yang disebut al fitnah alkubra. Kejadian ini memisahkan kaum muslimin kepada kelompok sunnah dan syi'ah. Pada jaman khalifah Ali bin abi Thalib, al fitnah al kubra ini berkembang melahirkan kelompok "dessident" (keluar dari barisan) yang terkenal dengan kelompok "Khariji". Kelompok ini bergerak dengan ego kelompok yang sangat tinggi sehingga berpengaruh pada konsep-konsep teologis. Mereka mengadakan takfir yakni mengkafirkan ummat terbanyak yang tidak sejalan dengan pendirian mereka. Dasar anggapannya adalah bahwa kaum muslimin kebanyakan saat itu sudah berdosa besar karena

sudah tidak melaksanakan hukum Allah, dan karena itu harus diperangi, sebab darah mereka halal ditumpahkan. Artinya mereka melancarkan gerakan jihad terhadap mayoritas kaum muslimin. Walaupun kelompok khariji ini tidak berumur panjang karena gerakan ekstrimnya, namun gerakan mereka menjadi rujukan atau menjadi sumber aspirasi kalangan militan muslim jaman modern, dengan gerakan yang lebih sistematis. Bentuk gerakannya melalui studi intensif konsep-konsep keagamaan secara amat literer, lantas mengkafirkan pihak lain yang berbeda pendirian, dan karena yang berbeda jumlahnya cukup banyak, mayoritas mutlak, maka kemudian melancarkan konsep hijrah (lebih tepat disebut 'uzlah). Dari posisinya sebagai mu'tazil itulah, kaum militan melancarkan jihad dalam arti perang melawan kaum muslimin mayoritas yang dianggap sudah sangat menyimpang, yakni jadi kaum jahiliyyah modern (meminjam istilah al Mawdudi). Cerita singkat ini menunjukkan bahwa sementara diakui adanya kelompok-kelompok muslim militan yang menggunakan cara-cara kekerasan -atas nama jihad- dalam mencapai agenda-agenda mereka sendiri, gerakan mereka tentu saja tidak mendapat dukungan luas kaum muslimin. Secara sosiologis, ini berarti penggerak jihad adalah kelompok deviant yang melawan norma-norma yang menjadi tradisi umat. Kenyataan kebanyakan umat menolak gerakan ekstrim, menurut Fazlurrahman (Azjumardi Azra, hal. 83) merupakan respon balik terhadap pemberontakan kaum Khariji yang terus mempengaruhi umat sampai masa sekarang. Gambaran ini selain menunjukkan tidak benarnya tuduhan Barat bahwa jihad dalam arti perang merupakan fenomena umum masyarakat Islam. Pada sisi lain juga menjelaskan bahwa pada jaman modern, jihad justru lebih banyak diartikan bukan perang. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Satrio Arismunandar (1991:87) yang menunjukkan bahwa di negara-negara Timur Tengah, ternyata sebagian besar gerakan-gerakan keislaman menolak sama sekali atau praktis tidak pernah tercatat melakukan aksi kekerasan. Gerakan-gerakan Islam yang mensahkan penggunaan kekerasan, mereka berada di negara yang pemerintahannya di bawah rezim otoriter, seperti Irak dan Suriah, atau di wilayah yang dijajah atau diduduki kekuatan asing seperti Palestina dan Libanon, atau di negara yang pemerintahannya dianggap terlalu condong ke Barat seperti Mesir dan Yordania. Sementara itu negara-negara Teluk yang umumnya kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Kuwait, gerakan-gerakan organisasi Islam,

selain sedikit jumlahnya, dinamika gerakanya juga kecil. Hal ini dikarenakan pertama, pemerintahannya yang menolak kehadiran organisasi gerakan-gerakan Islam, Kedua, karena kemakmuran materi akibat petrodollar yang membendung lahirnya politik alternatif; Ketiga sebagiannya menolak gerakan kekerasan, karena memang mereka telah diberi ruang gerak yang cukup baik dalam tatanan formal yang telah ada; Dan keempat, karena mereka sendiri merasa relatif bebas hidup dalam tatanan formal yang ada, maka mereka tidak merasa perlu untuk memakai cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan organisasinya.

Pembahasan ini mengemukakan bahwa jihad pada dasarnya perjuangan bathin bagi terbentuknya sikap konsisten antara hati, lidah, dan tangan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Yang paling utama melalui hati/jihad akbar yakni perjuangan seseorang dalam dirinya sendiri melawan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Tindak lanjutnya adalah dengan lidah dan tangan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sementara itu jihad dalam arti perang dimaksudkan membebaskan manusia dari penindasan, memperlihatkan jalan yang benar dan diridloi-Nya. Dalam kaitan ini, jihad sama dengan da'wah dengan perkataan dan perbuatan, jenisnya berbentuk amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat kewajiban kolektif.

Implikasi paedagogis dari makna jihad di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, perlu rekayasa kesatuan antara pembentukan kata hati dan keterampilan teknis, sebagaimana jihad perlu ada kesatuan antara hati, kata dan perbuatan. Pada tingkat mikro, setiap dosen perlu menampilkan konsep keterampilan teknis yang terintegrasi dengan kesatuan sikap pada setiap mata kuliah.

Kedua, pada tingkat meso design kurikulum idealnya tidak terpisah antara mata kuliah nilai dengan mata kuliah keterampilan. Ini tantangan yang cukup berat, namun bukan sesuatu yang mustahil. Dari sisi nomenklatur mata kuliah artinya bisa tidak harus ada mata kuliah tafsir atau hadits, namun langsung mata kuliah antropologi, psikologi, sosiologi, dst. yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Ketiga pada tingkat pemutus kebijakan sebaiknya sekat-sekat bidang studi jangan terlalu memakai hijab dengan dinding yang tebal. Dindingnya sebaiknya transparan saja. Artinya selama mahasiswa/pencari ilmu memiliki kapasitas yang kredibel, bidang-bidang ilmu tersebut terbuka bagi semua pihak. Rambu-rambu formal ijazah dengan pembidangan yang ketat, bila ijazah “anu” harus ke jurusan “anu” dan tidak dapat memasuki jurusan “anu”, sebaiknya diadakan pemikiran ulang.

4.2 Sikap Mujtahid

Sikap mujtahid adalah sikap hidup berijtihad. Ijtihad adalah upaya optimal pikiran manusia mencari kebenaran yang rambu-rambunya merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits Nabi. Imam Syafi'i dalam Risalahnya (1986:233-240), mencontohkan proses dan objek materia ijtihad kepada hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut dari pelaksanaan suatu tugas agama, seperti menentukan arah kiblat saat kita shalat yang tidak berhadapan langsung dengan masjidil haram (QS S2:150). Ijtihad bersifat individual, prosesnya melalui perhitungan dan penelitian terus menerus tanpa henti, sehingga sampai kepada kesimpulan yang dipercayai paling valid, reliable dan kredibel. Namun lantaran manusia bersifat subjektif dan kebenaran hasil pikirannya relatif, maka tidak tertutup kemungkinan upaya optimal tersebut tetap meleset dari kenyataannya. Yang terpenting dalam hal ini adalah kejujuran untuk mencari kebenaran dan tidak menyengaja untuk berbuat kesalahan. Karena itu kebenaran hasil ijtihad tidak mengikat. Ia mengikat hanya kepada orang yang berijtihad itu sendiri. Keterikatan itu sekaligus menjadi tolok ukur akan kejujuran berpikir dan bertindak. Berbeda dengan itu, manakala ijtihad tersebut dilakukan secara bersama-sama, hal itu disebut ijma, dilakukan melalui musyawarah. Perlu ditegaskan yang dimusyawarahkan bukan kebenaran otentisitas Al Qur'annya, tapi kebenaran hasil pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an.

Sebagaimana tersirat pada ungkapan di atas, instrumen ijtihad adalah akal pikiran manusia (ra'yu). Pemikiran berdasarkan pertimbangan individual tersebut, sudah menghasilkan ide-ide kreatif di bidang hukum, religious dan moral. Kekayaan pandangan para 'Ulama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan shalat, zakat, perkawinan, perdagangan malah sampai kepada konsep kekuasaan dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT

sangat banyak. Memang mengandung risiko, yakni saat hasil ijtihad disikapi oleh para pengikut sebagai kebenaran mutlak, maka akan terjadi saling silang pendapat, yang ekstrimnya berujung pada saling mengkafirkan. Keadaan demikian sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu para mujtahid dituntut etika khusus, yakni menghargai pendapat yang berbeda. Tidak sesak nafas saat menghadapi perbedaan dan malah pertentangan pendapat, namun tetap harus dalam kerangka otentisitas. Adalah karena mempertahankan otentisitas Al-Qur'an dan Hadits nabi, dengan penuh kejujuran ilmiahlah, yang menjadikan upaya ijtihad mendapat penilaian sangat luhur dari Nabi Muhammad saw., yakni pahala satu bagi yang salah dan pahala dua bagi yang benar. Namun dengan catatan, bahwa pahala tidak diberikan kepada upaya mengijtihadi hal-hal yang terlarang, dan tidak pula untuk kesalahan yang disengaja.

Sejak jaman dahulu terdapat pilihan manusia untuk menafsirkan al-Qur'an. Terdapat para ahli tafsir yang menekankan pemahaman al-Qur'an atas dasar pengertian teks-teks melalui uraian detil tentang kedudukan masing-masing kata dalam ayat (tafsir dirayah). Sementara pada sisi lain terdapat para ahli yang lebih menekankan kepada kata pendukung yang berkenaan dengan perilaku aktual yang saat diturunkannya ayat itu, berlangsung. Namun kesemuanya tetap dalam tradisi memahami al-Qur'an berdasarkan urutan ayat per ayat dari Al Fatihah dan An Nas. Belakangan ini terdapat "ketidakpuasaan" atas metode tersebut, karena tidak dapat menjawab suatu persoalan secara komprehensif. Mengatasi kelemahan tersebut, maka kemudian dikembangkan suatu metode tafsir yang baru yang dikenal dengan istilah tafsir maudhu'iy. Idenya adalah menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu permasalahan, ditarik benang merah yang menghubungkan tiap ayat tersebut dengan permasalahan, dan kemudian disusun konsep atas persoalan tersebut dilihat dari berbagai aspek yang terungkap dan terangkat dari ayat-ayat tersebut (Quraish Shihab, 1992:111-130).

5 Implikasi Sikap Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid

Apa implikasi paedagogis dari makna 3 M (mujtahid, mujaddid, dan mujahid), ini dalam proses pendidikan di Unisba?

Pertama-tama adalah proses pendidikan di Unisba hendaklah memberikan kebebasan dan bukan keterikatan. Analog dengan tuntutan kebebasan dari segala sesuatu selain Allah, maka dalam pendidikan perlu dikondisikan situasi bagi kebebasan berpikir. Namun tentu bukan tanpa rambu-rambu. Sebab kebebasan tanpa rambu-rambu adalah anarki. Artinya tetap perlu kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada konsekuensi pahit dari corak ini, yakni tuntutan bagi peningkatan diri secara terus menerus. Tanpa upaya demikian, maka mahasiswa akan kurang mendapat peluang berkembang.

Kedua, dalam proses pendidikan kebebasan butir satu di atas, dituntut sikap lapang dada dosen yang luar biasa. Dosen jangan cepat sesak napas saat mahasiswa melontarkan pikiran yang berbeda. Ini penting disadari sebab terkadang muncul persepsi menyimpang dari sementara ilmuwan kita, yakni sikap merasa tersaingi mahasiswa saat mereka melontarkan pikiran yang berbeda. Segera perlu ditegaskan bahwa perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan dosennya selama memenuhi rambu-rambu berpikir akademik (nalar, logis, runtut dan evidens/didukung data), hal itu merupakan indikator keberhasilan dosen mendidik para mahasiswa dalam rangka mendorong mahasiswa melakukan investigasi kebenaran.

Ketiga, dorongan bagi munculnya kejujuran melaksanakan pendirian. Berani menanggung risiko dari pikiran yang dilontarkan. Item ini merupakan antitesis dari sikap oportunis, yang justru sedang trendy, yang indikatornya antara lain adalah selalu bersikap menunggu Kecenderungan interest pihak yang kuat. Kadangkala memang terjadi kekeliruan konsep antara oportunis dan pragmatis. Pragmatis pada dasarnya sikap ilmuwan yang memang berorientasi efisiensi dan efektivitas.

6 Penutup

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik benang merah sebagai berikut :

- (1) Dalam konsep pendidikan Islam, jenis-jenis ilmu keislaman, tidak terbatas pada ilmu-ilmu normatif berdasar pada teks Al-Qur'an dan Hadist saja, tetapi bermakna termasuk juga ilmu-ilmu empirik.

- (2) Proses pendidikan dalam konsep Islam, selain berfungsi sebagai upaya “melestarikan” warisan budaya masa lalu, juga berfungsi untuk mengembangkan budaya tersebut ke masa depan. Dalam hal ini, pengembangan budaya menurut Islam mestinya tetap dalam “core” yang berasaskan Al-Qur’an dan Hadist baik dalam falsafah, teori, maupun praktiknya.
 - (3) Pendidikan keislaman ditandai oleh : pertama adalah “otentisitas” ajaran, dan kedua transformasi ajaran sesuai ruang, waktu, dan tempat di mana Islam dipraktekkan. Otentisitas ajaran Islam ditandai oleh sifat-sifatnya yang *holistik* (menyeluruh) dan *integral* (terpadu); sementara transformasinya ditandai oleh sifat-sifatnya yang hikmah (kebaikan dalam berbagai dimensinya) dan ma’ruf (kebaikan sesuai situasi dan kondisi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri). Ini berarti bahwa pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu empirik yang diajarkan di lembaga pendidikan tinggi Islam, seperti Unisba misalnya, harus dilandasi oleh ruh Islam, mulai dari formulasi tujuan, praktek bimbingan sampai dengan penerapannya (outputnya) di lapangan.
 - (4) Dengan dasar/pondasi Islam sebagai landasan berfikir, berjuang, dan berkreasi, maka tidak berlebihan apabila visi, misi, dan tujuan pendidikan tinggi di Unisba secara holistik dan integral menjadikan “produk keluarannya” insan intelektual yang berjiwa mujtahid, mujahid, dan mujaddid.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azjumardi. 1991. *Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis*, dalam *Islamika* No 4-1991.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka
- Nasr, Hussein 1990. *Pandangan Islam Tentang Etika Kerja*. Dalam *Ulumul Qur'an* 6, vol II 1990.
- Natsir, Mohammad. 1978. *Peranan Cendekiawan Muslim*. Dalam *Serial Media Da'wah* No. 53/1978. Jakarta: DDII
- Syafe'I, Imam. 1986. *Ar Risalah (terj.Ahmadie Thoha)* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Shihab, Quraish. 1992. *"Membumikan" Al Qur'an*. Bandung: Mizan
- Taimiyah, Ibn. 1983. *Menuju Ummat Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (terj. H. Hasan). Jakarta; Pustaka Panji Mas.
- Zuhaily, Wahbah. 1991. *Tafsir al Munir*. Damsyik: Darul Fikri.